



Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jember

Hendi Yoga Patama

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

pratamanural08@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani, dan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasinya sesuai dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mengupayakan berbagai strategi untuk menanggulangi persoalan ini. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, yang turut mengambil langkah konkret dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayahnya melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi, data yang di gunakan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis telaah dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Jember memiliki langkah dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, dengan harapan penelitian ini memeberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah serta bagi pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan agenda global SDGs di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kemiskinan, SDGs, PERDA

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang rumit dan tidak bisa dianggap sebelah mata. Meskipun sulit untuk diberantas sepenuhnya, isu ini tetap menjadi perhatian global yang sangat penting.¹ Saat ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah ini. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti yang disampaikan oleh Nanda Bhayu Pratama, tujuan utama SDGs adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dunia.²

Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Sebagai anggota PBB, Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam menangani masalah ini. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama menyangkut kesenjangan sosial yang kian melebar antara kelompok kaya dan miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa.³ Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 9,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 25,90 juta jiwa.⁴

Tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak 2013 hingga 2024. Meski demikian, terdapat beberapa periode peningkatan, seperti pada September 2013, Maret 2015, Maret dan September 2020, serta September 2022. Lonjakan harga kebutuhan pokok dan dampak pandemi Covid-19 menjadi faktor utama yang memicu kenaikan angka kemiskinan pada periode-periode tersebut.⁵

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

¹ Muana Nanga, Ester Fitriani HW, dkk, *Analisis Wilayah dengan Angka Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

² Nanda Bhayu Pratama, Eko Prio Purnomo, Agustiyara, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (Juli 2020): 65.

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024", Diakses pada, 22 September 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin>

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", Diakses pada, 22 September 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan>.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia 2024", (Berita Resmi Statistik, No. 50/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024).

Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam kerangka ini, berbagai program dirancang agar selaras dengan tujuan SDGs. Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya tentang keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi sosial masyarakat.⁶

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember sendiri selama periode 2010-2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 311,80 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 236,46 ribu jiwa pada tahun 2023, yang berarti terjadi pengurangan sebesar 75,34 ribu jiwa. Namun, selama pandemi Covid-19, khususnya pada 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Setelah itu, pada tahun 2022 angka kemiskinan kembali menurun. Meski demikian, pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023, terdapat sedikit peningkatan sebesar 3,37 ribu jiwa, dari 232,73 ribu jiwa menjadi 236,46 ribu jiwa.⁷

Fenomena kemiskinan di tengah tengah masyarakat harus di entaskan agar masyarakat bisa hidup dengan layak terutama pengentasan di kabupaten jember, maka dengan itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian kali ini penulis akan fokus pada beberapa strategi yang di terapkan oleh pemerintah kabupaten Jember sebagai upaya untuk mengurangi tingkat angka kemiskinan dalam rangka melaksanakan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumentasi, metode ini mencakup analisis terhadap berbagai materi dokumenter yang telah tersedia, seperti artikel, buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan resmi, catatan pribadi, dan laporan penelitian.⁸ Data yang dianalisis berasal dari sumber sekunder, yakni informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen relevan seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, catatan, serta artikel lainnya yang mendukung.⁹ Proses analisis data dilakukan melalui telaah literatur, kajian teoretis, dan pengamatan mendalam terhadap fenomena terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang hidup dalam keadaan yang jauh di bawah standar minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa kebutuhan pangan maupun non-pangan. Standar ini sering disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*) atau ambang kemiskinan (*poverty threshold*).¹⁰ Orang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran per kapitanya per bulan berada di bawah batas tersebut.¹¹ Untuk mengatasi persoalan ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs) hadir dengan misi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, yang hingga kini tetap menjadi salah satu tantangan global terbesar. Setiap negara dan wilayah memiliki metode yang beragam dalam menangani persoalan ini.

Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kerap diukur dari kemampuan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.¹² Kabupaten Jember, yang memiliki potensi geografis unggul serta kekayaan alam dan sejarah, mencatat perkembangan ekonomi yang cukup pesat, terutama dengan munculnya pusat-pusat perdagangan baru di sektor pertanian seperti padi dan palawija. Namun, berdasarkan data BPS, Jember termasuk salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.¹³ Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Salah satu tolak ukur utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah penurunan angka kemiskinan. Oleh karena itu, upaya serius dan terarah diperlukan untuk mengurangi kemiskinan di Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab V pasal 31. Kebijakan ini mencakup sejumlah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara langsung, guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.¹⁴ Kebijakan tersebut berisi terkait penganggulangan kemiskinan yang diaplikasikan dalam berbagai kegiatan:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial

⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember*, 2023.

⁷ Samsul Hadi, Ahmad Taufiki, Maulana Zakaria Ahmad, Adil Siswanto, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember", *Journal Of Indonesian Social Society* 02, No. 1, (Februari 2024), 34.

⁸ Azuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, ed. Fahrizal Zulkarnain, (Medan: Umsu Press, 2014), 70.

⁹ V. Ratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 89.

¹⁰ Marien Pinontoan, *Konsep dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 07

¹¹ Hilmi, Moh. Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati, dan Cytra Dewi Peuru, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli", *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 4, No. 1, (2022): 20.

¹² Wafi Farhan, Ilham Wahyu, dan Yuliatr Meganingruma, "Penerapan Teori Big Push dalam Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengatasi Kemiskinan Jember", *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, No. 1, (2020): 15.

¹³ Farhan, Wahyu, Meganingruma, "Penerapan", 15

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten jember. Nomor 8 Tahun 2015. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Diakses pada 03 Desember 2024, http://www.dokumidih.jatimprov.go.id/upload/20175/PERDA_NOMOR_8_TAHUN_2015_TENTANG_PENYELENGGARAAN_K.pdf.

- b. Pelayanan sosial
- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar
- e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan SDGs maka pemerintah kabupaten jember memiliki langkah serta kebijakan untuk mengurangi tingkat angka kemiskinan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA). Dengan 7 target tersebut menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ada sekaligus sebagai program dari pada pemerintah kabupaten jember dalam menyikapi masalah kemiskinan yang ada.

Pembahasan

Setiap tahun, isu kemiskinan terus menjadi perhatian utama dalam berbagai forum diskusi. Persoalan ini merupakan tantangan besar yang harus ditangani oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jember. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan perencanaan yang matang serta strategi yang terstruktur. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui penerapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana poin pertama pada aspek sosial menargetkan tercapainya kondisi “bebas dari kemiskinan”.¹⁵

Berbicara terkait kemiskinan kini masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi di Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari periode 2010 hingga 2023, jumlah penduduk miskin di daerah ini menunjukkan tren penurunan, dari 311,80 ribu jiwa menjadi 236,46 ribu jiwa. Namun, pandemi Covid-19 sempat menyebabkan lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2020-2021, sebelum kembali menurun pada tahun 2022. Meski begitu, pada periode 2023 terjadi sedikit peningkatan sebesar 3,37 ribu jiwa dalam rentang waktu Maret 2022 hingga Maret 2023.¹⁶

Menghadapi persoalan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan beberapa strategi yang bertujuan untuk setidaknya mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs yaitu tanpa kemiskinan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten jember dalam menyikapi kemiskinan terdapat beberapa kebijakan yang sekaligus menjadi dilaksanakannya program pemerintah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai pendekatan strategis. Salah satu langkah yang diambil adalah penyelenggaraan program penyuluhan dan pendampingan sosial. Program ini bertujuan memberikan masyarakat yang kurang mampu akses terhadap informasi, edukasi, dan wawasan tentang isu-isu penting seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, serta pengembangan keterampilan hidup. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat didorong untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat di masa mendatang.

Langkah strategi ini telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember dengan melakukan pelatihan literasi financial dan kesehatan keluarga dengan menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta turut menggandeng Union Yos Sudarso sebagai pihak yang memberikan edukasi mengenai literasi financial dan kesehatan keluarga yang menjadi salah satu program dalam menengentaskan kemiskinan di kabupaten jember.¹⁷

- b. Pelayanan Sosial

Di samping itu, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk layanan sosial, termasuk bantuan pangan, uang tunai, program pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, hingga program-program dukungan lainnya. Salah satu inisiatif unggulan yang dijalankan adalah Jember Berbagi (J-Berbagi), yang mencakup distribusi sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil serta balita. Program ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.¹⁸

- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi, pemerintah Jember memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat miskin dan mendukung pertumbuhan usaha kecil serta mikro. Sejumlah program pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga dukungan pemasaran disediakan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara finansial. Dengan mewujudkan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) kabupaten jember melaksanakan perluasan

¹⁵ Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati, dan Yana Fajar Basori, "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi", *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 9, No. 1, (Juni 2022), 110.

¹⁶ Hadi, Taufiki, Ahmad, Siswanto "Analisis", 34.

¹⁷ Pelatihan Literasi Finansial Dan Kesehatan Keluarga, Diakses pada 4 Desember 2024 <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pelatihan-literasi-finansial-dan-kesehatan-keluarga>.

¹⁸ Jalin Kedekatan dengan Warga Melalui J-Berbagi, Diakses pada 4 Desember 2024, <https://www.jemberkab.go.id/jalin-kedekatan-dengan-warga-melalui-j-berbagi/>.

kesempatan kerja dengan melakukan kelas bisnis sebagai wujud dari program tersebut, kelas bisnis tersebut merupakan upaya untuk pemberdayaan tenaga kerja yang anatominya memberikan seluas luasnya kepada pencari kerja dalam bidang wirausaha, memberikan wawasan dan pengetahuan dalam dunia usaha serta meningkatkan kesempatan kerja secara mandiri.¹⁹

d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam aspek kehidupan, dengan langkah ini masyarakat miskin diberikan ruang akses oleh pemerintah kabupaten jember dari segi layanan dengan dilakukan penyederhanaan terhadap mekanisme administrasi, memperbaiki sarana dan parasaran kesehatan hingga ke pelosok desa, melakukan revitalisasi puskesmas dengan menyediakan layanan rawat inap, mengedukasi masyarakat hidup sehat terhadap penyakit menular dan peningkatana upaya kesehatan melalui posyandu.²⁰

e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar

Program ini memberikan akses pendidikan dasar yang layak kepada masyarakat miskin seperti bantuan beasiswa pemkab bagi yang membutuhkan sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan. Dalam meningkatkan layanan pendidikan Pemkab jember melalui Dinas Pendidikan kabupaten jember turut mengambil bagian dalam pelayan pendidikan untuk masa depan cemerlang memalui pameran pelayanan yang di adalan oleh *Hall Grand City* Surabaya. Dispendik Jember menyoroti beberapa strategi sebagai upaya untuk pelayanan pendidikan di antaranya, perluasan akses pendidikan, peningkatan kopetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemanfaatan layanan berbasis digital melalui MyDispendik.²¹

f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman

Pemerintah Kabupaten Jember memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu berupa perumahan yang layak dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga mendukung upaya perbaikan dan renovasi pemukiman yang sudah tidak layak huni melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui program ini, pemerintah bersinergi untuk menjalankan peran sosial dalam mendukung anggota keluarga dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.²²

g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian akses pembiayaan dan investasi bagi pelaku usaha. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pemerintah menggandeng lembaga keuangan, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan, untuk menyediakan pendanaan yang inklusif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjadi langkah nyata dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di tarik kesimpulan mengenai langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan berbasis kebijakan dan program yang sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Jember masih menjadi tantangan yang cukup besar, meskipun terdapat tren penurunan jumlah penduduk miskin dari 2010 hingga 2023, dan terjadi kenaikan akibat pandemi Covid-19. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah kabupaten Jember menerapkan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dengan langkah yang tertuang dalam “Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember Bab V pasal 31” telah mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten jember untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan multidimensi. Meski demikian tantangan pengentasan kemiskinan membutuhkan evaluasi berkala dan peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar target pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mendukung terlaksananya penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada lembaga dan organisasi yang telah menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca serta memperhatikan hasil penelitian ini. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

¹⁹ Perluasan Kesempatan Kerja (Kelas Bisnis) oleh DISNSKER Jember, Di akse pada 4 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/perluasan-kesempatan-kerja-kelas-bisnis>.

²⁰ Kesehatan, Diakses pada 11 Desember 2024, <https://www.jemberkab.go.id/program-prioritas/kesehatan/>.

²¹ Dispendik Jember Hadirkan Inovasi Pelayanan Pendidikan di Pameran Publik Surabaya, Diakses pada 5 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/dispindik-jember-hadirkan-inovasi-pelayanan-pendidikan-di-pameran-publik-surabaya>.

²² Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Diakses pada 11 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/perbaikan-rumah-tidak-layak-huni-rtlh>.

²³ Fasilitasi Akses Pembiayaan & Investasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024, Diakses pada 5 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/fasilitasi-akses-pembiayaan-investasi-bagi-pelaku-usaha-mikro-tahun-2024>.

serta kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kita bersama dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024", Diakses pada, 22 September 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", Diakses pada, 22 September 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan>.
- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia 2024", (Berita Resmi Statistik, No. 50/07/Th. XXVII, 1 Juli 2024).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember*, 2023.
- Dispendik Jember Hadirkan Inovasi Pelayanan Pendidikan di Pameran Publik Surabaya, Diakses pada 5 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/dispindik-jember-hadirkan-inovasi-pelayanan-pendidikan-di-pameran-publik-surabaya>.
- Dzulqarnain, Ghulam Zakiyyan, Dine Meigawati, dan Yana Fajar Basori, "Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi", *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 9, No. 1, (Juni 2022, 109-116).
- Farhan, Wafi, Ilham Wahyu, dan Yuliatr Meganingruma, "Penerapan Teori Big Push dalam Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Mengatasi Kemiskinan Jember", *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, No. 1, (2020): 14-30
- Fasilitasi Akses Pembiayaan & Investasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024, Diakses pada 5 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/fasilitasi-akses-pembiayaan-investasi-bagi-pelaku-usaha-mikro-tahun-2024>.
- Hadi, Samsul, Ahmad Taufiki, Maulana Zakaria Ahmad, Adil Siswanto, "Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember", *Journal Of Indonesian Social Society* 02, No. 1, (Februari 2024). 32-39
- Hilmi, Moh. Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati, Cytra Dewi Peuru, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli", *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 4, No. 1, (2022): 19-26
- Jalin Kedekatan dengan Warga Melalui J-Berbagi, Diakses pada 4 Desember 2024, <https://www.jemberkab.go.id/jalin-kedekatan-dengan-warga-melalui-j-berbagi/>.
- Juliandi, Azuar, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, ed. Fahrizal Zulkarnain, (Medan: Umsu Press, 2014).
- Kesehatan, Diakses pada 11 Desember 2024, <https://www.jemberkab.go.id/program-prioritas/kesehatan/>.
- Nanga, Muana, dkk, *Analisis Wilayah dengan Angka Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018).
- Pelatihan Literasi Finansial Dan Kesehatan Keluarga, Diakses pada 4 Desember 2024 <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pelatihan-literasi-finansial-dan-kesehatan-keluarga>.
- Peraturan Daerah Kabupaten jember. Nomor 8 Tahun 2015. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Diakses pada 03 Desember 2024, <http://www.dokumjdih.jatimprov.go.id>
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Diakses pada 11 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/perbaikan-rumah-tidak-layak-huni-rtlh>.
- Perluasan Kesempatan Kerja (Kelas Bisnis) oleh DISNSKER Jember, Di akses pada 4 Desember 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/perluasan-kesempatan-kerja-kelas-bisnis>.
- Pinontoan, Marien, *Konsep dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020).
- Pratama, Nanda Bhayu, Eko Prio Purnomo, Agustiyara, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (Juli 2020): 64-74.
- Sujarweni, V. Ratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).